OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2021

"Upaya Pemulihan Perekonomian dan Kondisi Sosial dari Pandemi COVID-19"



OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2021

"Upaya Pemulihan Perekonomian dan Kondisi Sosial dari Pandemi COVID-19"



OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2021 "Upaya Pemulihan Perekonomian dan Kondisi Sosial dari Pandemi COVID-19"

ISBN: 978-602-5665-67-7 No. Publikasi: 14000.2205 Katalog: 3102044.14

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm Jumlah Halaman: x + 55 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Desain Kover dan Tata Letak:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pencetak:

CV M.N. Grafika

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

1811.bps.90.id

OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2021 "Upaya Pemulihan Perekonomian dan Kondisi Sosial dari Pandemi COVID-19"

Pengarah:

Misfaruddin

Editor:

Nelayesiana Bachtiar Fitri Hariyanti

Penulis:

Fitri Hariyanti Muji Basuki Bekti Indasari

Layout: Bekti Indasari

ntips://iau.pps.go.id

KATA PENGANTAR



Publikasi *OVERVIEW* PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2021 "Upaya Pemulihan Perekonomian dan Kondisi Sosial dari Pandemi COVID-19" ini berisi analisis ringkas yang mengkaji kondisi perekonomian dan sosial Riau di tengah upaya bangkit dari pandemi COVID-19. Aspek ekonomi yang dianalisis dalam buku ini meliputi Luas Panen dan Produksi Padi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi, Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor), dan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedangkan aspek sosial yang dianalisis adalah Kependudukan, Ketenagakerjaan, Indek Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Kemiskinan.

Buku ini merupakan salah satu buku dari serial Analisis Isu Terkini BPS Provinsi Riau tahun 2021 yang fokus pembahasannya mengenai keadaan perekonomian dan kondisi sosial Riau di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Dengan mengetahui kondisi riil, diharapkan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul yang terkait dengan ekonomi dan sosial selama pandemi COVID-19.

Publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan analisis di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian publikasi ini.

Pekanbaru, Maret 2022 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Misfaruddin

ntips://iau.pps.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
HIGHLIGHT	1
OVERVIEW	5
LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI	7
NILAI TUKAR PETANI (NTP)	9
INFLASI	
EKSPOR-IMPOR	11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	
KEPENDUDUKAN	
TENAGA KERJA	19
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	21
PEMBANGUNAN GENDER	23
KEMISKINAN	24
PENJELASAN TEKNIS	31
DAFTAR PUSTAKA	51

ntips://iau.pps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Provinsi Riau (ribu ton), 2020-2021
Gambar 2.	Perkembangan Luas Panen Padi di Provinsi Riau (ribu ha), 2020-2021 8
Gambar 3.	Nilai Tukar Petani Provinsi Riau (2018=100), 2021
Gambar 4.	Tingkat Inflasi Bulanan di Provinsi Riau (mtm,%), 2021 10
Gambar 5.	Ekspor Impor Provinsi Riau (miliar US\$), 2019-202111
Gambar 6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Riau (persen), 2021 13
Gambar 7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2016-2021 13
Gambar 8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021
Gambar 9.	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2021
Gambar 10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Komponen Pengeluaran (persen), 2021
Gambar 11.	Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2021
Gambar 12.	Jumlah Penduduk (juta jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau (persen), 1961-202117
Gambar 13.	Komposisi Penduduk Provinsi Riau, 202118
Gambar 14.	Rasio Ketergantungan Provinsi Riau (persen), 1990-2021 18
Gambar 15.	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021 19
Gambar 16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau (persen), 2020 & 2021
Gambar 17.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau (persen), 2020 & 2021 (Agustus)
Gambar 18.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau, 2017-2021 21
Gambar 19.	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau (tahun), 2017-2021
Gambar 20.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau (tahun), 2017-202122
Gambar 21.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Riau (Rp 000), 2017-202123

Gambar 22.	Perkembangan IPM Menurut Jenis Kelamin dan IPG di Provinsi Riau,	
	2016-2021	23
Gambar 23.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dalam Setahun Menurut Jenis	
	Kelamin di Provinsi Riau, 2016-2021	24
Gambar 24.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis	
	Kelamin di Provinsi Riau, 2016-2021	24
Gambar 25.	Jumlah (000 jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau,	
	2017 - 2021	26
Gambar 26.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan di Provinsi	
	Riau, September 2018 – September 2021	26
Gambar 27.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁) Provinsi Riau, Maret	
	2019 –September 2021	27
Gambar 28.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Riau, Maret	
	2019 – September 2021	28
Gambar 29.	Gini Rasio Menurut Daerah di Provinsi Riau, Maret 2020 – September	
	2021	28
	2021	

Highlight

ntips://iau.pps.go.id

HIGHLIGHT

- Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi setiap tahunnya. Produksi padi di Riau sepanjang Januari hingga Desember 2021 adalah sebanyak 217,46 ribu ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 26,23 ribu ton (-10,76 persen) dibandingkan 2020 yang sebesar 243,69 ribu ton GKG.
- Di tahun 2021, sektor pertanian memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Riau. Selama 12 bulan di tahun 2021 NTP Riau tetap terjaga di atas nilai 100.
 Secara umum NTP Riau terus mengalami peningkatan dengan puncak NTP tertinggi adalah pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar 152,18.
- Sepanjang tahun 2021, inflasi di Riau tercatat di level 1,54 persen. Rendahnya inflasi lebih dikarenakan cukup besarnya upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau untuk menjaga kontinuitas pasokan melalui inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).
- Neraca perdagangan Riau menunjukkan nilai yang surplus di periode Januari-Desember 2021 dengan penyumbang ekspor terbesar adalah sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan sebesar 36,33 persen.
- Ekonomi Riau secara kumulatif pada tahun 2021 tumbuh 3,36 persen. Angka tersebut tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi selama 8 tahun terakhir, sejak tahun 2013.
- Penduduk Riau terus mengalami peningkatan sejak sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961. Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2021 sebanyak 6,49 juta jiwa,
- Jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Riau periode Agustus 2021 mencapai 3,29 juta orang. Sedangkan TPAK Provinsi Riau pada periode Agustus 2021 tercatat menurun 0,21 poin persen dibandingkan Agustus 2020 (65,24 persen) sebagai dampak masih lesunya perekonomian Provinsi Riau di tengah pandemi COVID-19.
- Pada tahun 2021, capaian IPM Riau berhasil meningkat kembali sebesar 0,23 poin dibandingkan 2020 (72,71). Hal tersebut ditenggarai dengan peningkatan semua komponen penyusun IPM.

- Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,21 poin untuk IPM laki-laki dan sebesar 0,37 poin untuk IPM perempuan. Hal ini menyebabkan nilai IPG di tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin.
- Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat pendapatan dan meningkatnya kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau pada September 2021 sebesar 7,00 persen, mengalami penurunan sebesar 0,04 poin persen jika dibandingkan dengan September 2020 (7,04 persen).

Hitles: Illian in Park

Overview

ntips://iau.pps.go.id

OVERVIEW

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI

Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika. Tahun dimana seluruh masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat berkolaborasi, beradaptasi, serta baersama-sama berjuang keluar dari cengkeraman pandemi COVID-19.

Berbagai aspek kehidupan masyarakat masih terkena dampak dari Pandemi COVID-19. Tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga sangat berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan, apalagi belum diketahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir.

Menurut Organisasi Pangan Sedunia (FAO), potensi krisis pangan di masa pandemi akan mengancam dunia, termasuk Indonesia. Menjaga ketahanan pangan di masa pandemi adalah suatu keharusan dan menjadi satu program prioritas pemerintah Indonesia.

Pangan identik dengan beras, ini disebabkan karena hampir semua atau sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Oleh karena itu ketahanan pangan bagi Indonesia berkaitan erat dengan kecukupan penyediaan beras.

Padi sebagai tanaman penghasil beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi Indonesia, selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas padi juga merupakan sumber penghasilan utama dari jutaan petani. Tetapi tidak untuk Riau. Salah satu sumber penghasilan utama masyarakat Riau berada pada subsektor perkebunan, karena hampir 33 persen masyarakatnya bekerja pada lapangan usaha ini.

Riau merupakan salah satu daerah yang mengalami kerentanan pangan. Sebagai gambaran, untuk memenuhi kebutuhan beras yang mencapai 571 ribu ton per tahunnya, Riau hanya sanggup memproduksi beras 139.130 ton per tahun. Lebih kurang 65 persen kebutuhan beras daerah ini didatangkan dari luar daerah, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara (gatra.com, 15/11/2021).

Selain berupaya meningkatkan produksi sendiri, Pemerintah Provinsi Riau juga terus berusaha meningkatkan kerjasama dengan daerah pemasok dengan membangun dan memperbaiki akses infrastruktur ke daerah sentra pangan di luar provinsi Riau.



Gambar 1. Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Provinsi Riau (ribu ton), 2020-2021

Walaupun tidak menjadi sumber penghasilan utama, tetapi Riau tetap berupaya untuk meningkatkan produksi padi setiap tahunnya. Produksi padi di Riau sepanjang Januari hingga Desember 2021 adalah sebanyak 217,46 ribu ton GKG. Mengalami penurunan sebesar ribu 26,23 ton (-10,76)persen) dibandingkan 2020 yang sebesar 243,69 ribu ton GKG. Penurunan produksi terjadi karena terjadi penurunan luas panen yang disebabkan adanya bencana banjir, masa tanam yang lebih cepat di akhir tahun 2020, dan mahalnya biaya pengolahan lahan yang menyebabkan lahan sawah tidak tertanami padi.

Tiga kabupaten/kota dengan total potensi produksi padi (Gabah Kering Giling/GKG) tertinggi pada 2021 adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.



Gambar 2. Perkembangan Luas Panen Padi di Provinsi Riau (ribu ha), 2020-2021

Peningkatan atau penurunan produksi padi tidak terlepas dari besar kecilnya luas panen padi. Berdasarkan hasil Survei KSA, terjadi pergeseran puncak panen padi pada 2021 dibandingkan 2020. Puncak panen padi pada 2021 terjadi pada bulan Juli, sementara puncak panen pada 2020 terjadi pada bulan Maret.

Sepanjang Januari hingga Desember 2021, realisasi panen padi sebesar 53,06 ribu hektar atau mengalami penurunan sebesar 11,67 ribu hektar (-18,03 persen) dibandingkan 2020 yang sebesar 64,73 ribu hektar. Luas panen tertinggi pada 2021 terjadi pada Juli, yaitu sebesar 10,09 ribu hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu sebesar 1,41 ribu hektar.

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut berdampak terhadap sektor dunia usaha. Tidak sedikit sektor dunia usaha yang masih terpuruk. Namun ternyata masih ada jenis usaha yang mampu bertahan di tengah pandemi. Salah satunya adalah usaha pada sektor pertanian.

Di tahun 2021, sektor pertanian memberikan kontribusi positif perekonomian Riau. Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana selama tahun 2021 tumbuh 4,26 persen, terutama ditopang oleh kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Riau di tahun 2021 mencapai 26,83 menduduki peringkat kedua persen, setelah lapangan usaha Industri Pengolahan yang memiliki peranan 28,08 persen.

Tidak hanya dalam PDRB yang mengalami pertumbuhan positif, tapi juga mengalami peningkatan dalam ekspor. Selama rentang waktu Januari-Desember 2021, ekspor nonmigas dari industri pengolahan hasil pertanian yang didominasi oleh lemak & minyak hewan/nabati (CPO dan turunannya)

mencapai USD 11,29 miliar atau sebesar 62,82 persen dari total nilai ekspor non migas Riau yang mencapai USD 17,97 miliar.

Bertahannya sektor ini di saat pandemi berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Semakin tinggi nilai NTP, semakin baik daya beli petani terhadap pemenuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian, dan berarti tingkat kehidupan petani relatif lebih sejahtera.

Sepanjang tahun 2021, NTP Riau tetap terjaga di atas nilai 100. Meskipun terjadi fluktuasi atau naik turun tetapi secara umum NTP Riau terus mengalami peningkatan dengan puncak NTP tertinggi adalah pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar 152,18. Tingginya NTP lebih disebabkan karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan yang sangat signifikan akibat dari naiknya harga pada sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kelapa.



Gambar 3. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau (2018=100), 2021

Selain itu, meskipun ekonomi dunia juga masih terdampak COVID-19 tetapi hal ini tidak menyurutkan permintaan hasil olahan kelapa sawit (*Crude Palm* Oil atau CPO). Permintaan CPO dari negaranegara pengimpor tetap tinggi meskipun sempat terjadi penurunan permintaan tetapi tidak signifikan. Permintaan dalam negeri akan CPO sebagai bahan dasar biodiesel sebagai akibat dari program pemerintah B30, menjadikan permintaan CPO tetap tinggi.

INFLASI

Salah satu indikator makro ekonomi pembangunan suatu wilayah adalah inflasi. Sepanjang tahun 2021, inflasi bulanan tercatat pada level yang masih rendah dan inflasi di tahun 2021 tercatat sebesar 1,54 persen.

Rendahnya tingkat inflasi di masa pandemi COVID-19 tahun 2021 berbeda dengan tahun 2020. Rendahnya inflasi di tahun 2020 lebih disebabkan karena adanya penurunan daya beli masyarakat akibat dari dampak pandemi Covid 19, yang dibuktikan dengan terkontraksinya nilai PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,11 persen.

Sedangkan rendahnya inflasi di tahun 2021 lebih dikarenakan upaya vang cukup besar dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau untuk menjaga kontinuitas pasokan melalui inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) (infopublik.id, 07/01/2022). Hal ini dapat dibuktikan karena pada tahun 2021, nilai PDRB komponen pengeluran konsumsi rumah tangga tumbuh cukup signifikan yaitu sebesar 3,20 persen. Nilai menerangkan bahwa konsumsi rumah mengalami tangga iauh pengalami peningkatan dibandingan dengan tahun 2020.

Ketergantungan Riau yang sangat tinggi terhadap pasokan dari luar daerah terutama komoditas yang termasuk komponen bergejolak (*volatile*) seperti cabai, daging ayam ras, dan bawang merah, terus menjadi perhatian pemerintah (infopublik.id).



Gambar 4. Tingkat Inflasi Bulanan di Provinsi Riau (mtm,%), 2021

Aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak pada triwulan II 2021 setelah pada triwulan I 2021 mengalami penurunan yang cukup siginifikan. Hampir seluruh sektor ekonomi sudah dibuka kembali melalui penerapan protokol kesehatan ketat. vang Walaupun demikian, aktivitas ekonomi belum kembali pada level sebelum merebaknya pandemi COVID-19.

Upaya pemerintah ke depan salah satunya yakni dengan mengembalikan kondisi perekonomian sehingga daya beli masyarakat dapat kembali normal.

EKSPOR-IMPOR

Neraca perdagangan Provinsi Riau menunjukkan nilai yang surplus pada periode Januari-Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ekspor lebih signifikan dibandingkan vang peningkatan impor. BPS mencatat nilai ekspor Provinsi Riau pada periode Januari-Desember 2021 tercatat USD 19,70 miliar, sementara impor tercatat sebesar USD 1,62 miliar sehingga neraca perdagangan menunjukkan surplus USD 18,08 miliar. Nilai surplus ini meningkat 44,64 persen dibandingkan tahun 2020, jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan nilai surplus neraca perdagangan periode 2019-2020 sebesar 14,20 persen.

Ekonom Center of Reforms on Economics (Core) yaitu Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa surplus neraca dagang ini relatif cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi karena ditopang oleh peningkatan ekspor yang lebih tinggi di tengah peningkatan impor.



Gambar 5. Ekspor Impor Provinsi Riau (miliar US\$), 2019-2021

Penyumbang ekspor terbesar pada periode Januari-Desember 2021 yaitu sektor industri vang mengalami sebesar 36.33 peningkatan persen dibanding periode yang sama tahun lalu. sisi lain, ekspor sektor migas mengalami peningkatan signifikan sebesar 201,90 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. ekspor Peningkatan migas vang signifikan ini salah satunya disebabkan peningkatan adanya produksi yang terjadi pasca pengambil alihan Blok Rokan ke Pertamina Hulu Rokan.

Adapun pangsa tujuan ekspor masih didominasi Tiongkok (19,64 persen), diikuti India (12,82 persen) dan Belanda (5,93 persen). Secara umum, kinerja ekspor Riau di tengah pandemi ini justru

lebih baik dengan 42,68 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ekspor di era pandemi ini secara berturut-turut justru mengalami pertumbuhan cukup besar, yaitu sebesar 11,31 persen pada tahun 2020 dan kini pada tahun 2021 sebsar 42,68 persen.

Walaupun tidak setinggi pertumbuhan ekspor, impor di periode Januari-Desember 2021 ini turut tumbuh secara positif sebesar 22,99 persen, sehingga pertumbuhan impor yang lebih kecil dibandingkan ekspor mengakibatkan terjadinya surplus neraca perdagangan pada tahun 2021. Pertumbuhan impor yang positif pada tahun 2021 ini sekaligus menjadi perbaikan kinerja impor dibandingkan periode Januari-Desember 2020 yang turun negatif 8,35 persen. Peningkatan kinerja impor tersebut ikut mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta tentunya konsumsi rumahtangga.

Apabila dilihat menurut golongan penggunaan barang, komoditas barang konsumsi memang mengalami penurunan, dimana terjadinya penurunan sebesar negatif 13,45 persen. Namun perannya dalam impor Riau relatif kurang signifikan karena hanya menyumbang 2,87 dari total impor. Akan tetapi, fenomena penurunan impor barang konsumsi dapat menunjukkan keberhasilan program peningkatan konsumsi barang produksi dalam negeri,

di tengah penurunan permintaan domestik akibat pandemi. Namun, ada kemungkinan ini adalah sinyal bahwa masyarakat kelas menengah ke atas cenderung menunda belanja dan memperbanyak simpanan.

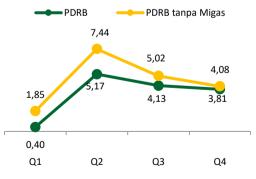
Adapun kontribusi impor terbesar berasal dari komoditas bahan baku/ penolong, yaitu menyumbang sebesar 88,08 persen dari total impor. Pada periode Januari-Desember 2021, impor bahan baku/penolong justru tumbuh 31.67 persen. sebesar Peningkatan impor bahan baku/penolong menunjukkan kapasitas produksi yang membaik. Hal ini merefleksikan permintaan barang masih sudah mulai meningkat. Negara pemasok barang impor masih didominasi Tiongkok 27,38 persen, diikuti Kanada 17,83 persen dan Finlandia 7,08 persen.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Hingga penghujung tahun 2021, pandemi COVID-19 tak kunjung berakhir. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak dalam pengendalian pandemi COVID-19 berhasil mendongkrak keyakinan masyarakat untuk kembali beraktivitas. Hal tersebut didukung dengan hasil laporan Google Mobility yang menunjukkan peningkatan aktivitas masyarakat di luar rumah.

Program vaksinasi COVID-19 yang terus digeniot dan pelonggaran mobilitas masyarakat yang banyak diterapkan 2021, mendorong sepanjang tahun pemulihan perekonomian nasional maupun regional. Ditiniau secara triwulanan dan tahunan, ekonomi Riau tahun 2021 kembali memasuki zona positif, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020.

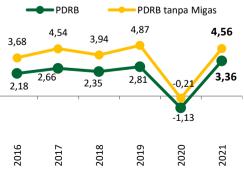
Pertumbuhan ekonomi Riau telah menunjukkan sinval positif seiak triwulan I-2021 yang tercatat tumbuh 0,40 persen. Angka tersebut terus menunjukkan perbaikan hingga penghujung tahun 2021. Bahkan mulai triwulan II-2021 hingga triwulan IV-2021 ekonomi Riau berturut-turut mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni sebesar 5,17 persen; 4,13 persen; dan 3,81 persen.



Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Riau (persen), 2021

Pada triwulan II-2021, ekonomi Riau melesat tajam dan menyentuh angka 5,17 persen. Jika dihitung tanpa Migas, ekonomi Riau bahkan tercatat tumbuh sangat signifikan mencapai 7,44 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya *low base effect* dimana pertumbuhan yang tinggi tersebut dipengaruhi faktor dari basis pertumbuhan ekonomi yang rendah pada triwulan II-2020 yang terkontraksi 3,32 persen.

Ekonomi Riau secara kumulatif pada tahun 2021 tumbuh 3,36 persen. Angka tersebut tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi selama 8 tahun terakhir, sejak tahun 2013. Jika dihitung tanpa Migas, pertumbuhan ekonomi Riau mengalami kenaikan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,56 persen. Meskipun mulai terjadi aktivitas pengeboran dan pengembangan sumur minyak mentah baru di Blok Rokan, namun penurunan produksi minyak mentah akibat natural declining masih menahan laiu pertumbuhan ekonomi Riau.



Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2016-2021

Nilai PDRB Provinsi Riau atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 843,21 triliun rupiah. Secara nilai tersebut nominal. mengalami kenaikan sebesar 114,56 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar 728,65 triliun rupiah. Begitupun jika ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 489,98 triliun rupiah menjadi 506,46 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau disebabkan karena meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Sedangkan kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku selain dipengaruhi oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada beberapa lapangan usaha, juga salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas didorong oleh sentimen positif seperti melesatnya harga minyak mentah Indonesia, termasuk di Riau, sebagai salah satu komoditas utama dalam ekonomi Riau.



Gambar 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021

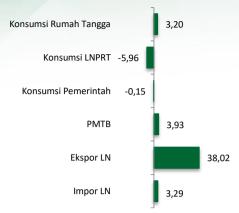
Sepanjang 2021, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17,44 persen dibandingkan tahun sebelumnnya. Hal ini disebabkan intensitas penggunaan hotel oleh rumah tangga, swasta, dan pemerintah instansi mengalami peningkatan setelah pada tahun mengalami sebelumnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu, kenaikan iuga dikarenakan mulai menggeliatnya kegiatan usaha penyediaan makan minum serta aktivitas iasa katering. Disusul oleh Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 11,54 persen. Kenaikan

tersebut disebabkan adanya peningkatan realisasi belanja fungsi kesehatan pada APBN Provinsi Riau untuk penanganan COVID-19 karena pada tahun 2021 mengalami lonjakan kasus terkonfirmasi positif yang cukup signifikan. Selain itu, peningkatan juga dikarenakan banyaknya permintaan uji swab antigen dan **PCR** untuk mendapatkan surat bebas COVID-19 sebagai syarat perjalanan antardaerah. Program vaksinasi COVID-19 yang mulai berjalan dan digesah pada tahun ini juga membuat Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh. Selanjutnya, Perdagangan dan Reparasi juga meningkat sebesar 9,95 persen. Pembelian kendaraan bermotor yang tercatat mengalami peningkatan cukup tinggi diakibatkan adanya kenaikan harga komoditas kelapa sawit di tingkat petani serta adanya stimulasi kebijakan penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Perdagangan eceran lainnya juga mengalami peningkatan aktivitas yang terekam dari analisis google mobility di pasar.



Gambar 9. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2021

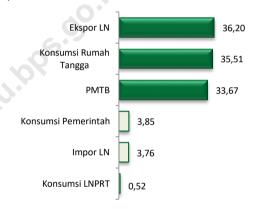
Besarnya ketergantungan Provinsi Riau terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha digambarkan melalui struktur ekonomi. Sepanjang tahun 2021, struktur perekonomian Riau didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, vaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dagangan dan Reparasi; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Riau.



Gambar 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Komponen Pengeluaran (persen), 2021

Ditinjau dari sisi pengeluaran, sebagian komponen mengalami peningkatan. Ekspor Luar Negeri merupakan komponen dengan pertumbuhan paling tinggi sebesar 38,01 persen. Pertumbuhan ini dipicu akibat meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas unggulan Riau seperti vaitu lemak & minyak hewan/nabati, bubur kayu/pulp, kertas/karton, migas, serta berbagai produk kimia. Sedangkan, kontraksi paling besar terjadi pada komponen Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 5,96 persen. Hal ini dikarenakan adanya penurunan aktivitas partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi parpol setelah pelaksanaan kampanye serta pilkada serentak pada tahun 2020 di kabupaten/kota.

Komponen Ekspor Luar merupakan komponen pengeluaran yang dominan dalam perekonomian Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 36,20 persen. Selanjutnya disusul oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi 35,51 persen. Di sisi lain, pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian Riau juga, yaitu 33,67 persen.



Gambar 11. Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2021

KEPENDUDUKAN

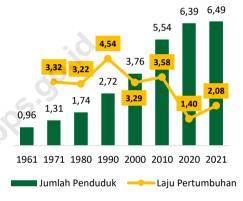
Tahun 2021 merupakan salah satu tahun yang tidak dilaksanakan snsus penduduk. Data kependudukan yang diperoleh pada tahun 2021 berasal dari hasil proyeksi penduduk, dimana perhitungan ilmiahnya didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran,

kematian, dan migrasi. Berdasarkan hasil proyeksi interim penduduk Indonesia 2021–2023 tercatat jumlah penduduk Provinsi Riau pada pertengahan tahun 2021 sebanyak 6,49 juta jiwa. Angka ini terus mengalami peningkatan sejak sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020, terlihat adanya peningkatan sebanyak 99,51 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Povinsi Riau selama periode 1971 hingga 2010 berada di atas 3 persen dengan rata-rata 3,57 per tahun. Sedangkan pada periode 2010 hingga 2020 sedikit mengalami perlambatan. Pada dekade terakhir ini, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau hanya sebesar 1,40 persen per tahun. Angka tersebut melambat 2.18 persen poin dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010. Kendati demikian, laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 tehadap 2020 kembali meningkat menjadi 2,08 persen.

Fenomena menarik yang ditemukan pada periode 2000-2010 adalah Riau merupakan provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi penerima migran terbesar. Adanya pembukaan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit secara massif, akibat permintaan komoditas yang meningkat pesat, menjadi penyebab

meningkatnya daya tarik migrasi penduduk ke Provinsi Riau. Selain itu, tersedianya lowongan pekerjaan dari berbagai sektor ekonomi lainnya antara lain lapangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan industri pengolahan, menjadikan Riau menjadi tujuan para pencari kerja dari luar Provinsi Riau.

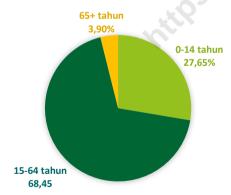


Gambar 12. Jumlah Penduduk (juta jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau (persen), 1961-2021

Jika diperhatikan pada periode 2010-2020, pola migrasi penduduk ke Provinsi Riau mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini didukung dengan fenomena penutupan dan pengalihan lokasi beberapa perusahaan besar, seperti rencana alih operasi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina. Dalam waktu tersebut, perusahaan minyak ini dikabarkan telah melakukan efisiensi dengan cara perampingan jumlah karyawan maupun pemutusan

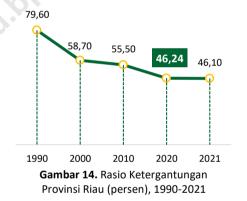
hubungan kerja dengan para perusahaan subkontraktornya. Kebijakan tersebut membuat ribuan karyawan perusahaan yang terkait dengan Chevron terkena dampaknya dan kembali ke daerah asal masing-masing.

Ditinjau dari sisi usia, komposisi penduduk menjadi suatu hal yang penting. Komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang sangat besar merupakan salah satu modal pembangunan di Provinsi Riau. Jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Riau tahun 2021 tercatat sebanyak 4,44 juta jiwa dengan proporsi sebesar 68,45 persen. Sedangkan untuk proporsi usia non-produktif sebesar 27,65 persen (usia 0-14 tahun) dan 3,90 (usia 65 tahun ke atas).



Gambar 13. Komposisi Penduduk Provinsi Riau, 2021

Perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) digambarkan oleh rasio ketergantungan (dependency ratio). Rasio ketergantungan di Riau pada tahun 1990 mencapai 79,60 persen dan menurun menjadi 55,50 persen pada tahun 2010. Angka ini mengalami tren menurun hingga menjadi 46,10 persen pada tahun 2021. Artinya dari 100 orang penduduk produktif menanggung secara ekonomi 46 orang usia nonproduktif. Penurunan rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Berdasarkan keterbandingan jenis kelamin, pada tahun 2021 proporsi penduduk laki-laki di Provinsi Riau sebesar 51,20 persen atau sebanyak 3,32 juta jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Riau sebanyak 3,17 juta orang atau 48,80 persen dari penduduk Provinsi Riau. Dari kedua informasi tersebut menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk

Provinsi Riau sebesar 105. Hal ini berarti terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan di Provinsi Riau. Rasio jenis kelamin bervariasi jika ditinjau menurut kelompok usia.

Rasio jenis kelamin di level Provinsi Riau sejalan dengan level nasional, dimana penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini juga berlaku sama untuk seluruh kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Riau.



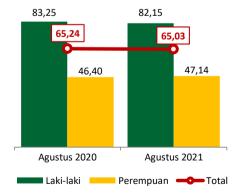
Gambar 15. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021

Provinsi Riau memiliki luas daratan sebesar 87,02 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk penduduk sebanyak 6,49 juta jiwa maka kepadatan penduduk Provinsi Riau di tahun 2021 sekitar 75 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kota Pekanbaru menjadi wilayah terpadat di Provinsi Riau. Hal tersebut dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki luas geografi terkecil atau sebesar 0,73 persen wilayah Provinsi Riau, namun dihuni oleh 0,99 juta jiwa atau 15,32 persen penduduk Provinsi Riau. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai mempunyai sebaran penduduk di bawah 5 persen penduduk Provinsi Riau.

TENAGA KERJA

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan secara semesteran, penduduk yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Riau periode Agustus 2021 mencapai 3,29 juta orang. Sedangkan pada periode Agustus 2020 jumlah angkatan kerja Provinsi Riau sebanyak 3,23 juta orang. Untuk mengetahui ukuran keaktifan penduduk usia kerja dapat dilihat dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).



Gambar 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau (persen), 2020 & 2021

TPAK Provinsi Riau pada Agustus 2021 tercatat sebesar 65,03 persen, turun sebesar 0,21 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang besarnya 65,24 persen. Ditiniau berdasarkan jenis kelamin, terlihat perbedaan yang signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan pada kedua periode. TPAK laki-laki berada di kisaran 82 persen ke atas, sedangkan TPAK perempuan berada di rentang 46 hingga 47 Perbedaan persen. tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan yang tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dengan perempuan.

Jika ditelusuri lebih jauh, pada periode Agustus 2021 terlihat bahwa **TPAK** laki-laki mengalami iustru Hal tersebut ditengarai penurunan. akibat banyaknya tenaga kerja laki-laki yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dirumahkan selama pandemi COVID-19 lantaran adanya pengurangan tenaga kerja. Berbanding terbalik dengan TPAK laki-laki, angka TPAK perempuan mengalami kenaikan 0,74 persen poin. Jumlah peningkatan partisipasi kerja perempuan adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang meningkat di tengah pandemi. Sementara di saat yang sama pendapatan kaum laki-laki sebagai kepala keluarga mengalami penurunan atau bahkan hilang akibat PHK.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). **TPT** Provinsi Riau pada Agustus 2021 mengalami penurunan menjadi 4,42 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Riau, terdapat 4 orang yang masuk kategori pengangguran. Jika ditelusuri lebih jauh, baik daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami lonjakan TPT pada periode Agustus 2020. Lonjakan ini dipicu akibat lesunya perekonomian Provinsi Riau sebagai dampak pandemi COVID-19.



Gambar 17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau (persen), 2020 & 2021 (Agustus)

Jika ditinjau lebih jauh, penurunan TPT pada periode Agustus 2021 di perkotaan menyentuh angka diatas 1 persen poin, begitu juga halnya penurunan TPT yang terjadi di daerah perdesaan. Hal ini disebabkan karena

adanya kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat seiring menurunnya kasus COVID-19 pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, sehingga aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak baik di perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan daerah perdesaan kategori pertanian lebih mendominasi lapangan usaha. Sepanjang tahun 2021. pertanian perkebunan merupakan lapangan usaha yang justru mengalami pertumbuhan positif disebabkan kebaikan harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit akibat permintaan CPO yang meningkat di pasar global.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup upaya manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hingga tahun 2019, IPM Riau menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah membalikkan tren pembangunan manusia untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Hal ini ditenggarai adanya penurunan pengeluaran per kapita yang disesaikan.

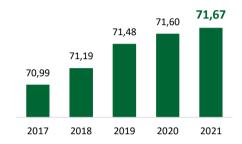
Pada tahun 2021, capaian IPM Riau berhasil meningkat kembali sebesar 0,23 poin dibandingkan 2020. Hal tersebut ditenggarai dengan peningkatan semua komponen penyusun IPM. Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu faktor yang mendukung kenaikan IPM adalah terjadinya perbaikan kinerja ekonomi Riau yang berdampak positif terhadap komponen pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. IPM Riau tahun 2021 tercatat sebesar 72,94 atau naik 0,23 poin (0,32 persen) dibanding tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, ratarata pertumbuhan IPM tahun 2017-2021 sebesar 0,40 persen per tahun.



Gambar 18. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau, 2017-2021

Torehan posisi IPM Riau di tingkat Nasional pada tahun 2021 berada pada peringkat 7 dari 34 provinsi serta peringkat 2 dari 10 provinsi di Sumatra. Kendati demikian, angka tersebut masih belum mampu mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan, yakni sebesar 73,13. Di sisi lain, capaian IPM Riau 2021 juga masih berada di bawah kondisi IPM tahun 2019 sebesar 73,00.

Ditinjau dari dimensi dasar yang membentuk IPM, ketiganya mengalami peningkatan pada tahun 2021. Pertama, Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2017 hingga 2021, Riau telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,68 tahun atau tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun.



Gambar 19. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau (tahun), 2017-2021

Pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan representasi yang dimensi pengetahuan. Selama periode 2017 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,48 persen per tahun. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Riau telah mencapai 13,28 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan mereka hingga jenjang Diploma II (tidak tamat).



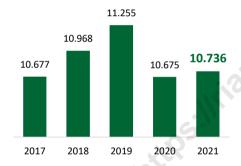
Gambar 20. Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau (tahun), 2017-2021

Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Riau tumbuh 1,21 persen per tahun selama periode 2017 hingga 2021. Pada tahun 2021 Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Riau usia 25 tahun ke atas mencapai 9,19 tahun, atau telah menduduki jenjang pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I) namun tidak selesai.

Menurut UNICEF (Dana Anak-Anak PBB), global siswa secara para mengalami kurangnya aset rumah tangga yang diperlukan untuk menerima layanan pembelajaran digital. Hal ini terutama dialami oleh anak perempuan, tinggal di perdesaan dan merupakan keluarga miskin. Sehingga mengurangi dampak lebih lanjut dari pandemi ini, kualitas pendidikan juga patut mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Sedangkan pada dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh

pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012), pada tahun 2021 pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Riau mencapai Rp 10,74 juta per tahun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0.57 persen. Setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran per kapita penduduk Riau mulai mengalami perbaikan dan kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 21. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Riau (Rp 000), 2017-2021

Peningkatan pengeluaran per kapita secara tidak langsung menggambarkan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Provinsi Riau. Naiknya pendapatan diakibatkan membaiknya daya beli masyarakat seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

PEMBANGUNAN GENDER

Upaya pemerintah untuk memulihkan segala aspek kehidupan akibat pandemic COVID-19 membuahkan hasil. salah satunya meningkatnya kualitas hidup manusia. Terlihat dari kenaikan nilai IPM baik lakimaupun perempuan. Kenaikan terjadi sebesar 0,21 poin untuk IPM lakilaki dan sebesar 0,37 poin untuk IPM perempuan. Hal ini menyebabkan nilai IPG di tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin.



Gambar 22. Perkembangan IPM Menurut Jenis Kelamin dan IPG di Provinsi Riau, 2016-2021

Dalam laporan Kesenjangan Gender Global 21 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia pada akhir Maret 2021 menyebutkan bahwa dampak pandemi COVID-19 kian memperlebar kesenjangan gender. Kemajuan menuju kesetaraan gender terhenti di beberapa sektor-sektor akibat yang terpukul pembatasan sosial. Akan tetapi, pada

tahun 2021 kondisi ini kian membaik seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19.

Pada 2021. tahun rata-rata pendapatan perempuan yang didekati melalui pengeluaran jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki di Riau. Jika ratapendapatan laki-laki sudah rata mencapai 16,20 juta rupiah, maka perempuan hanya sekitar 7,24 juta rupiah. Peningkatan pengeluaran perkapita laki-laki sebesar sebesar 0,27 iuta, sedangkan perempuan terjadi peningkatan pengeluaran perkapita sebesar 0,30 juta.



Gambar 23. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dalam Setahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2016-2021

Pelonggaran mobilitas masyarakat yang telah diterapkan sepanjang tahun 2021 membawa dampak terhadap sosial ekonomi kegiatan maupun masyarakat pada akhirnya yang berdampak pada kenaikan pengeluaran masyarakat. Berbeda dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada 2021. tahun TPAK laki-laki

mengalami penurunan sementara TPAK perempuan mengalami peningkatan. Perbedaan ini disebabkan karena selama masa pandemi banyak perempuan yang membantu bekerja.



Gambar 24. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2016-2021

KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, buta huruf, dan ketidaksamaan derajat antarjenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*World Bank*, 2017).

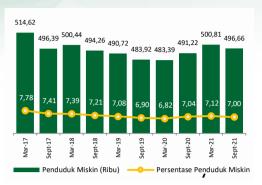
COVID-19 Pandemi memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini mengganggu aktivitas masyarakat baik ekonomi dan sosial. Imbas dari PSBB adalah terjadinya penurunan tingkat pendapatan masyarakat mengakibatkan yang meningkatnya kemiskinan.

Mengutip dari laman resminya (11/06/2020), Bank Dunia mendorong agar negara-negara di dunia untuk membuat terobosan kebijakan ekonomi dalam rangka mengatasi ancaman kemiskinan ekstrem. Akibat pandemi virus COVID-19. Bank Dunia mengkhwatirkan akan ada 71 juta penduduk dunia yang jatuh kepeada kemiskinan ekstrem. Kenaikan angka kemiskinan ekstrem ini tercatat menjadi vang pertama kali terjadi sejak tahun 1998 atau dua dekade terakhir.

Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan kemiskinan pada masa pandemi COVID-19. Secara umum, pada periode September 2012-September 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun terdapat kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada September 2013, Maret 2015, dan September 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin saat itu dipicu oleh bencana kebakaran hutan dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Selanjutnya, mulai Maret 2016 sampai dengan Maret 2020 penduduk dan persentase penduduk miskin di Riau terus menurun, sampai kemudian terjadi kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada September 2020, kemudian naik lagi pada Maret 2021. baru sedikit

mengalami penurunan pada September 2021. Peningkatan iumlah dan persentase penduduk miskin di Riau pada September 2020 tidak lepas dari pandemi COVID-19 yang pengaruh melanda seluruh negara di dunia, yang memukul berbagai sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali di Provinsi Riau. Pembatasan kegiatan ekonomi terutama terkait dengan yang pergerakan orang menyebabkan pada kegiatan ekonomi pendapatan (tersebut. Hal ini berimbas pada kenaikan iumlah penduduk miskin pada September 2020.

Persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Riau pada September 2020 sebesar 7,04 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2019 (6,90 persen). Bahkan Maret 2021 kembali pada teriadi kenaikan persentase penduduk miskin 0,08 poin, dimana pada September 2020 ada 7,04 persen penduduk miskin, menjadi 7,12 persen pada Maret 2021. Tetapi kemudian persentase penduduk miskin turun menjadi 7,00 persen pada September 2021.



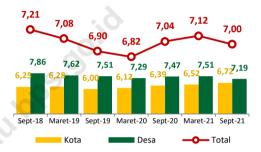
Gambar 25. Jumlah (000 jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau, 2017 - 2021

Penurunan persentase kemiskinan yang terjadi di Riau pada September 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: **Pertama**, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau pada Agustus 2021 adalah sebesar 4,42 persen, terjadi penurunan sebesar 1,90 persen poin dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 6,32 persen.

Kedua, sempat terjadi peningkatan jumlah pengangguran pada awal-awal merebaknya pandemi COVID-19. Dimana pada Agustus 2019 terdapat 190.143 pengangguran, kemudian meningkat menjadi 203.837 pada Agustus 2020. Tetapi seiring dengan berbagai program pemulihan ekonomi yang bergulir, jumlah pengangguran turun menjadi 145.669 orang pada Agustus 2021.

Ketiga, Ekonomi Riau triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 naik sebesar 4,13 persen (y-on-y). Secara tahunan, ekonomi Riau tahun 2021 (*c-to-c*) tumbuh 3,36 persen.

Keempat, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III dan IV 2021 secara berturut-turut tumbuh positif sebesar 2,93 dan 6,59 persen (yon-y), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang turun sebesar negatif 2,32 dan negatif 1,57 persen. Secara tahunan, konsumsi rumah tangga di Riau tahun 2021 (c-to-c) tumbuh 3,20 persen.



Gambar 26. Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan di Provinsi Riau, September 2018 – September 2021

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, pengaruh dilonggarkannya aktivitas masyarakat seiring menurunnya kasus COVID-10 lebih besar dampaknya terhadap masyarakat perkotaan lebih dibandingkan perdesaan. Hal ini disebabkan karena di perkotaan perekonomian lebih aktif dibandingkan perdesaan. Pada daerah periode September 2020 - September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 12,53 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 7,09 ribu orang. Pada periode September 2020 - September 2021, persentase penduduk miskin di daerah

perkotaan naik sebesar 0,33 persen poin, dari 6,39 persen pada September 2020 menjadi 6,72 persen pada September 2021. Sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 0,28 persen poin, dari 7,47 persen pada September 2020 menjadi 7,19 persen pada September 2022.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang diperhatikan perlu adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kemiskinan memberikan Keparahan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.



Gambar 27. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) Provinsi Riau, Maret 2019 – September 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Riau pada periode September 2019-September 2021 terlihat mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2020

sebesar 1,32 turun menjadi 1,09 pada September 2021. Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), mengalami penurunan dari 0,43 pada September 2020 menjadi 0,28 pada September 2021. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kemiskinan Keparahan (P2) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tentu dipengaruhi oleh peningkatan harta tanda buah segar (TBS) kelapa sawit yang dinikmati oleh rumah tanga yang bekerja di sektor pertanian perkebunan sawit.

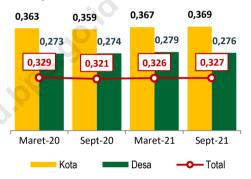
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan September 2021 1,12, mengalami sedikit sebesar peningkatan dari September 2020 yang tercatat 1,02. Justru Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perdesaan mengalami penurunan dari September 2020 yang tercatat 1,53 menjadi 1,08 pada September 2021. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan cenderung cenderung menjauhi garis kemiskinan pada September 2021, sedangkan ratarata pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan justru mendekati garis kemiskinan pada September 2021.

Jika dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di daerah perkotaan terlihat meningkat dari 0,27 pada September 2020 menjadi 0,31 pada September 2021. Sebaliknya, di daerah perdesaan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,54 pada September 2020 menjadi 0,26 pada September 2021. Dengan demikian, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di daerah perkotaan relatif mengalami pada September peningkatan 2021, sedangkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di daerah perdesaan relatif mengalami penuruunan di periode tersebut.



Gambar 28. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Riau, Maret 2019 – September 2021

Perbedaan pendapatan masyarakat dapat menimbulkan ketimpangan. Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya Gini Concentration Ratio. Indeks Gini/Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.



Gambar 29. Gini Rasio Menurut Daerah di Provinsi Riau, Maret 2020 – September 2021

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Gini Rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Gini Rasio di Provinsi Riau terlihat sedikit naik dari tahun 2020 2021. Pada hingga September 2020, Gini Rasio Provinsi Riau sebesar 0,321. Secara perlahan, angka tersebut naik hingga September 2021 berada pada posisi 0,327. Hal ini menandakan bahwa terjadinya penurunan pendapatan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 terjadi di semua golongan pendapatan rumah tangga, baik kalangan atas maupun

kalangan bawah, sehingga kesenjangan sedikit meningkat.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, dalam periode September 2020 — September 2021, Gini Rasio di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,369, sedangkan Gini Rasio daerah perdesaan sebesar 0,276. Jika dibandingkan dengan Maret 2021, Gini Rasio perkotaan sedikit naik dari 0,367 menjadi 0,369. Sementara itu, Gini Rasio perdesaan sedikit mengalami penurunan dari 0,279 kondisi Maret 2021 menjadi 0,276 pada September 2021.

35.90:10

ntips://iau.pps.go.id

Penjelasan Teknis

ntips://iau.pps.go.id

PENJELASAN TEKNIS

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI

Kerangka Sampel Area (KSA) didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), pengindraan iauh. teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

1. Sejak 2018, BPS telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Teknologi (BPPT), Penerapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melakukan penyempurnaan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode KSA. KSA ini memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari LAPAN

- dan digunakan BIG untuk mendelineasi peta lahan baku sawah yang divalidasi dan ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mengestimasi luas panen padi.
- 2. Penyempurnaan dalam berbagai penghitungan tahapan produksi beras telah dilakukan secara komprehensif tidak hanya luas lahan baku sawah saja tetapi juga perbaikan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras. Secara garis besar, tahapan dalam penghitungan produksi beras:
 - a. Luas lahan baku sawah nasional yang digunakan mengestimasi luas panen yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/ 2019 tanggal 17 Desember 2019 adalah sebesar 7.463.948 hektar dan luas lahan baku sawah Provinsi Riau sebesar 62.689 hektar.
 - Pengamatan fase tumbuh padi untuk menghitung luas panen dengan KSA yang dikembangkan bersama BPPT dan telah mendapat pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Produktivitas per hektar berasal dari Survei Ubinan yang telah dilakukan penyempurnaan dengan mengganti metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi berbasis sampel KSA.

Angka konversi dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) dan angka konversi dari GKG ke beras berasal dari Survei Konversi Gabah ke Beras pada tahun 2018 yang merupakan angka konversi yang lebih akurat dengan melakukan survei di dua periode musim yang berbeda dengan basis provinsi sehingga didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi yang memperhitungkan pengaruh musim.

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Pengertian Umum:

- NTP merupakan indikator proksi kesejahteraan petani
- NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib)

Arti Angka NTP:

 NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami Kenaikan harga produksi defisit. relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan dengan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat

Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) dapat juga menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Cakupan Komoditas

- Subsektor Tanaman Pangan, seperti: padi, palawija
- Subsektor Hortikultura, seperti: sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan
- Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antardaerah
- Subsektor Peternakan, seperti: ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Subsektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

Pengumpulan Data Harga

Dilakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar HKD-1, HKD-2.1, HKD-2.2, HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, HD-5.1, HD-5.2, dan HP-6

 Daftar HKD-1 mencatat harga eceran barang kelompok makanan untuk keperluan konsumsi rumah tangga

- petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
- HKD-2.1 Daftar mencatat harga eceran barang/jasa kelompok nonmakanan (dalam hal ini untuk ienis konstruksi, iasa, transportasi) untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
- Daftar HKD-2.2 mencatat harga eceran barang kelompok nonmakanan (dalam hal ini adalah jenis aneka perlengkapan rumah tangga dan lainnya) untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran terdekat dengan tanggal 15.
- Daftar HD-1 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor tanaman pangan (TP). Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-2 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian

subsektor tanaman hortikultura. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.

- Daftar HD-3 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk produksi keperluan pertanian subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR). Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
 - Daftar HD-4 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor peternakan. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-5.1 dan HD-5.2 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor perikanan tangkap dan budidaya. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15

dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.

Pemilihan Sampel (Kecamatan)

Dengan rancangan sampling dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama, dari setiap provinsi dipilih secara purposif bersyarat, dipilih sejumlah kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi pertanian,
- Tahap kedua, dari setiap kabupaten terpilih, dipilih sejumlah kecamatan yang merupakan sentra produksi pertanian.

Pemilihan Pasar

Pemilihan pasar di kecamatan terpilih berdasarkan kriteria:

- Paling besar di kecamatan tersebut
- Beraneka ragam barang yang diperdagangkan
- Kebanyakan masyarakat berbelanja di sana
- Dapat dijamin kelangsungan (kontinuitas) pencatatan harganya

INFLASI

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu Sedangkan Indeks negara. Harga konsumen (IHK) adalah suatu indeks, vang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa vang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam penghitungan Indeks rangka Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa vang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Indeks Harga Konsumen Indonesia dihitung dengan rumus Laspeyres termodifikasi. Dalam penghitungan ratarata harga komoditas, ukuran yang digunakan adalah rata-rata aritmetik, tetapi untuk beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, bensin, dan sebagainya digunakan rata-rata geometrik.

Mulai Januari 2020, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2018=100 dan mencakup 90 kota yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK

sebelumnya menggunakan tahun dasar 2012=100 dan hanya mencakup 82 kota.

Dalam menyusun IHK, data harga diperoleh dari 90 kota, konsumen mencakup antara 248-473 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran yaitu: makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; perlengkapan, dan pemeliharaan peralatan, rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Setiap kelompok terdiri dari beberapa subkelompok, dan dalam setiap subkelompok terdapat beberapa Lebih komoditas. jauh, komoditaskomoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi.

Beberapa pasar tradisional, pasar modern, dan outlet di setiap kota dipilih untuk mewakili harga-harga dalam kota tersebut. Data harga masing-masing komoditi diperoleh melalui wawancara langsung dari 3 atau 4 pedagang eceran, yang didatangi oleh petugas pengumpul data.

Penarikan sampel secara *purposive* digunakan untuk melakukan pemilihan kota, pasar, outlet, responden, komoditas dan kualitas dalam

penghitungan IHK (yang paling dominan).

Frekuensi pengumpulan data harga berbeda antara satu komoditas dan komoditas lainnya, tergantung karakteristik masing-masing komoditas, sebagai berikut:

- Pengumpulan data harga beras dilakukan secara harian di Jakarta, dan mingguan di kota-kota lainnya.
- Beberapa komoditas yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok, data harga dikumpulkan setiap minggu pada hari Senin dan Selasa.
- Untuk beberapa komoditas bahan makanan, data harga dikumpulkan setiap dua minggu sekali, hari Rabu dan Kamis pada minggu pertama dan ketiga.
- Untuk komoditas bahan makanan lainnya, makanan yang diproses, minuman, rokok dan tembakau, data harga dikumpulkan bulanan pada hari Selasa menjelang pertengahan bulan selama tiga hari (Selasa, Rabu, dan Kamis).
- Data harga untuk barang-barang tahan lama dikumpulkan secara bulanan pada hari ke-5 sampai hari ke-15.
- Data harga jasa-jasa dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.

- Data harga sewa rumah dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Upah baby sitter dan asisten rumah tangga diamati bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Data yang berhubungan dengan biaya pendidikan dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.

EKSPOR-IMPOR

Perdagangan luar negeri terdiri dari ekspor dan impor barang-barang.

Cakupan Komoditas

Semua jenis barang termasuk kecuali yang termasuk di bawah ini:

- a. Pakaian dan perhiasan dari para penumpang.
- Barang bawaan penumpang yang digunakan untuk keperluan sendiri, kecuali lemari es, televisi, dsb.
- Barang-barang yang diekspor/diimpor dari suatu negara untuk digunakan untuk keperluan kedutaan besar negara tersebut.
- d. Barang-barang yang digunakan untuk keperluan ekspedisi dan pameran.
- e. Barang-barang yang diekspor/diimpor secara langsung oleh angkatan bersenjata.
- f. Peti kemas yang dimaksudkan untuk diisi.

- g. Catatan-catatan dari bank dan keamanan.
- h. Barang-barang contoh.

Sistem Perdagangan

- a. Statistik ekspor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum yang meliputi seluruh area geografi Indonesia.
- b. Statistik Impor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Khusus yang meliputi seluruh area geografi Indonesia kecuali Zona Perdagangan Bebas dimana berlaku Perdagangan Luar Negeri.

Penilaian

- a. Ekspor mengacu pada nilai *Free On Board* (FOB).
- b. Impor mengacu pada nilai *Cost Insurance and Freight* (CIF).
- Keduanya dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat (USD)

Pengukuran Kuantitas

Semua kuantitas dinyatakan dalam bentuk berat neto dalam satuan kilogram.

Rekan Negara

- a. Negara tujuan adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim.
- Negara asal adalah negara dimana barang-barang tersebut diproduksi, setelah diverifikasi oleh Kantor Bea Cukai, sesuai dengan peraturan.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (kategori) yaitu:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran;
 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Jasa Keuangan
- Real Estate
- Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya.

Beberapa kategori di atas ada yang dirinci lagi menjadi subkategorisubkategori.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa diterima oleh faktor-faktor vang produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- pengeluaran konsumsi pemerintah
- pembentukan modal tetap domestik bruto
- perubahan inventori, dan
- ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

PENDUDUK

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia:

Informasi tentang tanggal, bulan, dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk umur dari responden. mengetahui Penghitungan umur harus selalu dibulatkan ke bawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan, maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian penting baik nasional maupun daerah.

Status Perkawinan:

a. Belum Kawin

Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.

b. Kawin

Status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk di dalamnya mereka yang kawin sah secara hukum (hukum adat, agama, negara, dsb) maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

c. Cerai Hidup

Status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena bercerai dan belum kawin lagi.

d. Cerai Mati

Status untuk mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Anak Lahir Hidup:

Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memeperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis, dan tanda-tanda kehidupan lainnya.

Anak Masih Hidup:

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.

Tempat Lahir:

Tempat lahir responden adalah provinsi tempat tinggal ibu kandungnya pada saat melahirkannya.

Cara Pengumpulan Data Penduduk:

a. Sensus Penduduk

Berdasarkan peraturan perundangan (UU No. 6 Tahun 1960; UU No. 7 Tahun 1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, vaitu pencacahan dan lengkap pencacahan sampel. Informasi yang dikumpulkan lebih lengkap dalam pencacahan sampel.

Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan

keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

b. Survei Penduduk Antar Sensus

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi, khususnya fertilitas, keluarga berencana, dan mortalitas. Rumah tangga terpilih diwawancara untuk tujuan ini.

d. Registrasi Penduduk

Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini (dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri) menggunakan pendekatan de jure.

TENAGA KERJA

Konsep/Penjelasan Teknis

- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- 2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- 3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- 4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi oleh vang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- 5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya.

Contoh:

- a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
- c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan, dan sebagainya, seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, komersial. dan penyanyi sebagainya

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "An ILO Manual on Concepts and Methods")

- Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:
 - Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, iadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

 Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/ pekerjaan yang "baru" bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/ tempat, mengurus surat izin usaha sebagainya, dan telah/sedang dilakukan.

 Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (own account worker) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan:

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

- a. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari iam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).
- b. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari tidak pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:

a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka tersebut. tidak usahanya serta menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/ pekerja tak dibayar dan atau buruh/ pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/ pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai tetap, tidak digolongkan majikan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/ rumah tangga) yang sama dalam sebolan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bolan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah

- atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- g. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebolan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun Usaha borongan. non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik. gas dan air. sektor konstruksi/bangunan, sektor angkutan, perdagangan, sektor pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan iasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi pada 2001, tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf

- d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).
- h. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

- a. Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
- b. Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

Sumber utama data ketenagakeriaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia?

- IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- 1. Umur panjang dan hidup sehat
- 2. Pengetahuan
- 3. Standar hidup layak

Apa Saja Manfaat IPM?

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Mengapa Metodologi IPM Diubah?

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM.

PERTAMA

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- PDRB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

KEDUA, penggunaan rumus rata-rata aritmetik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa Saja yang Berubah?

Indikator

- Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode Penghitungan

Metode agregasi diubah dari ratarata aritmetik menjadi rata-rata geometrik.

Apa Keunggulan IPM Metode Baru?

Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

- Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

KEMISKINAN

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Daerah tertinggal (atau kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1. Perekonomian masyarakat
- 2. Sumber daya manusia
- 3. Sarana dan prasarana
- 4. Kemampuan keuangan daerah
- 5. Aksesibilitas
- 6. Karakteristik daerah

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

GK = GKM + GKNM

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis kemiskinan makanan

GKNM = Garis Kemiskinan non makanan

Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data

pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

Garis kemiskinan dihitung sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan,
- Mengalikan harga tersebut dengan 2100 yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari,
- Menghitung nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan,
- Menghitung proporsi penduduk miskin dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Gap Index-P1), (Poverty merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap kemiskinan. miskin garis Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. https://iall.bps.go.id ntips://iau.pps.go.id

Daftar Pustaka

ntips://iau.pps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

2020. Petani Andri, K.B. Strateai Menghadapi Pandemi Covid-19. https://mediaindonesia.com/read/detail/308928-strategi-pertanianmenghadapi-pandemi-COVID-19. Diakses pada Tanggal 30 Februari 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Riau. Berita Resmi Statistik No. 06/01/14/Th.XXII. 21 Januari 2021. Pekanbaru: BPS. . 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau Tahun 2021. Berita Resmi Statistik No. 59/11/14/Th.XXII. 15 November 2021. Pekanbaru: BPS. . 2021. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Agustus 2021. Berita Resmi Statistik No.56/11/14/Th. XXIII, 5 November 2021. Pekanbaru: BPS. . 2022. Luas Panen dan Produksi Padi di Riau 2021 (Angka Tetap). Berita Resmi Statistik No.16/03/14/Th. XXII, 15 Maret 2022. Pekanbaru: BPS. . 2022. Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Riau Januari 2022. Berita Resmi Statistik No. 11/02/14/Th.XXIII. 15 Februari 2022. Pekanbaru: BPS. . 2022. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Desember 2021. Berita Resmi Statistik No.02/01/14/Th. XXIII, 3 Januari 2022. Pekanbaru: BPS. . 2022. Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV-2021. Berita Resmi Statistik No. 10/02/14/Th.XXIII. 17 Februari 2022. Pekanbaru: BPS. . 2022. Profil Kemiskinan di Provinsi Riau. Berita Resmi Statistik No.05/01/Th. XXIII, 17 Januari 2022. Pekanbaru: BPS. bisnis.com. 2021. Impor Bahan Baku Kembali Terkontraksi, Manufaktur Belum Pede?. https://ekonomi.bisnis.com/read/20201116/12/1318305/impor-bahan-bakukembali-terkontraksi-manufaktur-belum-pede. Diakses tanggal 2 Februari 2022. bps.go.id. Ekspor (Milyar US\$), 2021. https://riau.bps.go.id/indicator/8/36/1/ekspor.html. Diakses tanggal 26 Februari 2022. . Impor (Juta US\$), 2021. https://riau.bps.go.id/indicator/8/39/2/impor.html. Diakses tanggal 26 Februari 2022. . Inflasi (Persen), 2021. https://riau.bps.go.id/indicator/3/1/2/inflasi.html. Diakses tanggal 26 Februari 2022. . NTP 2021. https://riau.bps.go.id/indicator/22/33/2/ntp.html. Diakses tanggal 26 Februari 2022. Burhanuddin, C.I. & Abdi. M.N. 2020. Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). Jurnal Ilmiah AkMen. 17 (1): 710-718.

- cnbcindonesia.com. 2021. *Alasan Ekonomi RI Meroket 7,07%: Low Base Effect di 2020*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210805112917-4-266288/alasan-ekonomi-ri-meroket-707-low-base-effect-di-2020. Diakses tanggal 5 Maret 2022.
- Dwi, H.J, 2020. Momentum Pertumbuhan Sektor Pertanian Akibat Pandemi. https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fb4accc40b8b/moment um-pertumbuhan-sektor-pertanian-akibat-pandemi. Diakses tanggal 28 Februari 2022.
- ECLAC, & ILO. (2020). La Pandemia Por El COVID-19 Podría Incrementar El Trabajo Infantil En América Latina Y El Caribe. Technical Note No.1, Santiago, Chile (dalam https://www.latinamerica.undp.org. UNICEF and UNDP Report Reveals The Impact of the Pandemic on Education). Diakses tanggal 27 Februari 2022.
- Fajar, B.H. & Akita, A.V. 2020. *Kebijakan Pangan di Masa Pandemi COVID-19*. CSIS Commentaries DMRU-048-ID.
- indonesia-investments.com. 2021. *Minyak Kelapa Sawit*. https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?. Diakses tanggal 26 Februari 2022.
- indopremier.com. 2020. *Covid-19 Picu Perubahan Besar pada Struktur Tenaga Kerja Nasional*.https://indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Covid_19_Picu _Perubahan_Besar_Pada_Struktur_Tenaga_Kerja_Nasional&news_id=126366&gr oup_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=,&halaman=1. Diakses tanggal 12 Februari 2022.
- infopublik.id. 2021. *Meski Pandemi Covid-19, Inflasi di Riau 2020 Masih Terkendali*. http://infopublik.id/kategori/nusantara/496315/meski-pandemi-covid-19-inflasi-di-riau-2020-masih-terkendali. Diakses tanggal 25 Februari 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. *Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bergantung Pada Efektivitas Penanganan Covid-19*. Siaran Pers HM.4.6/220/SET.M.EKON.3/08/2021, 16 Agustus 2021. Jakarta: Ekon.
- Kementrian Pertanian. 2020. *Dampak COVID-19 Terhadap Sektor Pertanian*. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementrian Pertanian. Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian Vol 1 No.2/ 2020 (April).

- Muliati, N. K. 2020. Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2010 (Covid-19). Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan. 2(2): 78-86.
- Nugroho, S. & Pitoyo, A. J. 2017. *Arus Migrasi Risen di Indonesia Tahun 1980-2020*. Jurnal Bumi Indonesia Vol. 6 No.4.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Provinsi Riau. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Informasi Publik, 8 Juni 2020. Pekanbaru: PPID.
- Rangga D. Yofa, 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekspor Dan Impor Komoditas Pertanianh*. ttps://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/08-BBRC-2020-II-2-3-RDY.pdf. Diakses tanggal 28 Februari 2022
- republika.co.id. 2021. Anomali Inflasi Tahun Ini Akibat Terus Melemahnya Daya Beli. https://republika.co.id/berita/qehh4l409/anomali-inflasi-tahun-ini-akibat-terus-melemahnya-daya-beli. Diakses tanggal 25 Februari 2022.
- riaupos.jawapos.com. 2021. *Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi*. https://riaupos.jawapos.com/feature/28/12/2020/243734/mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi.html. Diakses tanggal 25 Februari 2022.
- Risalah Sektoral ILO. 2020. *Covid-19 dan Dampaknya Pada Pertanian dan Ketahanan Pangan*. International Labour Organization: Departemen Kebijakan Sektoral.
- Rivani, E. 2020. Surplus Neraca Perdagangan dan Harapan Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol.XII:20. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- UNICEF. 2020. *COVID-19: Are Children Able to Continue Learning during School Closures?*UNICEF: New York. NY. USA.
- weforum.org. 2021. United Nations Social Economic Recovery Framework. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/united-nations-social-economic-recovery-framework/. Diakses tanggal 27 Februari 2022.



MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru 28131 Telp : (0761) 23042, Fax : (0761) 21336

Homepage: http://www.riau.bps.go.id, E-mail: bps1400@bps.go.id

